

TESIS

**URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh:

PRO PATRIA

RINI WULANDARI

NIM 12118015

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2020

TESIS

**URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya*

Oleh:

**RINI WULANDARI
PRNIM 12118015A**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

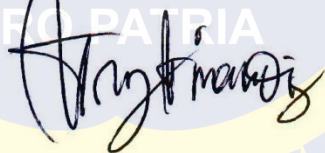
RINI WULANDARI

NIM 12118015

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 11 Agustus 2020
.....

Oleh:

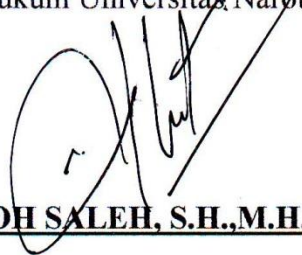
Dosen Pembimbing



Dr. WORO WINANDI, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr MOH SALEH, S.H.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI
PADA TANGGAL: 24 AGUSTUS 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing

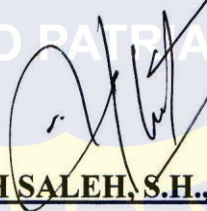


Dr. WORO WINANDI, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama

PRO PATRA



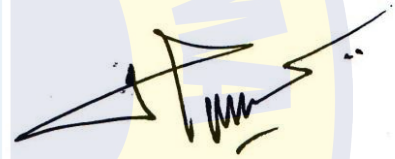
Dr. MOH SALEH, S.H., M.H.

SEMINAR HASIL TESIS

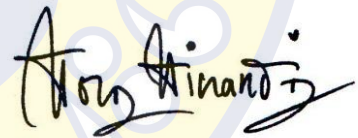
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS

Penyangga : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H.,
M.Kn



Pembimbing : Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.





FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI
No. Induk Mahasiswa : 12118015
Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 36

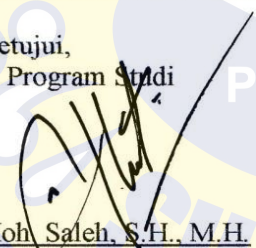
Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum
2. _____
3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Dr. Moh Saleh, S.H., M.H.

Surabaya, 22 Februari 2020
Mahasiswa


RINI WULANDARI

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12118015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- II. Judul Tesis: URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
- III. Nama Pembimbing: Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal 8, Agustus 2020,

Ketua,

DR. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Sekretaris

TAHEGGA PRIMANANDA, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum

Jabatan Fungsional : ASISTEN AHLI

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Pini Wulandari

No. Induk Mahasiswa : 12118015

Judul : URGensi KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

PRO PATRIA

Surabaya, 02 September 2019
Calon Pembimbing,

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN
No.575/SPT/NR-FH/03/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. WORO WINANDI, S.H., M.Hum.	12118015	RINI WULANDARI	Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Aspek Kriminogen Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 11 Oktober 2019

Dekan,



Dr.Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI

No. Induk : 12118015

Alamat : Kota Surabaya

Telp/HP : 0821-4625-6508

Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Judul Tesis : URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tgl Dimulai :

Surabaya, 8 Agustus 2020

Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

RINI WULANDARI

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	LATAR Belakang Dan rumusan Masalah		
2	Perbaikan latar belakang dan diskusi teori yang dipakai		
3	Metodologi penelitian hukum		
4	Perbaikan pendekatan dalam penelitian dan tamba rumusan		
5	Ace		

- Syarat :
1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
 2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI

No. Induk Mahasiswa : 12118015

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyetujui Untuk Diuji,

Surabaya, 8 Agustus 2020

Pembimbing,

Kaprodi,

Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : RINI WULANDARI

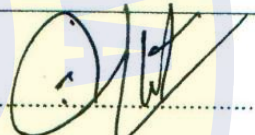
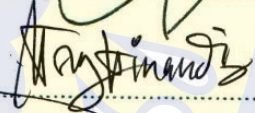

N I M : 12118015

Tanggal Penilaian :

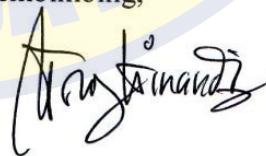
Judul Tesis1 : **URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum	

Surabaya, 26 Agustus 2020
Pembimbing,



Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI

No. Induk Mahasiswa : 12118015

Program Studi/Angkatan : Magister Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS pada Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Menyetujui Untuk Diseminarkan
Pembimbing,

Surabaya, 06 Agustus 2020
Ka. Prodi

Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN
TESIS

Nama Mahasiswa : Rini Wulandari

No. Induk : 12118015

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1	Rosalita Debby Endiantji	Pertindungan hukum terhadap lessor adanya pengalihan obyek fidusia dan lesse secara meluas	10 agustus 2019	<i>[Signature]</i>
2	Irisa mamul Shouby	Perlindungan hukum peserta pada asuransi pemangng yg dipersejatkan	10 Agustus 2019	<i>[Signature]</i>
3	Minanto angga widjaja	Pelunasan hutang melalui aksepsi objek ssc oleh hak tanggungan	10 Agustus 2019	<i>[Signature]</i>
4	Abd. Malik	Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yg diperoleh dg cara receiver wesring	10 Agustus 2019	<i>[Signature]</i>
5	Azhklari	analisa putusan pengadilan negeri banyuwangi pada 10/8/19 tentang permohonan penarikan moaet	16/8/19	<i>[Signature]</i>
6	Agus Suluhm	Ulangi Anonim di pada Ronsan per WC berdasarkan atedan	16/8/19	<i>[Signature]</i>
7	Wong ching yau	Perbaikan pelgari dan campuran perampokan religus agantz waktu was anta	16/8/19	<i>[Signature]</i>
8	Smyu Indan Samudro	Personalia hami hak pbsn pelehe pendeta yg oleh mempunyai kecuafan hami fedip oleh allekoben	16/8/19	<i>[Signature]</i>
9	I Made paxana	Penyidhgunaan keclanangn Pei Lessdratn dlm mns sst don dmn mko dan un no 35 th 2019	16/8/19	<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

10	<i>Endang Sukarta</i>	<i> tanggung jawab notaris atas lagu yang telah saya beli dan saya simpan</i>	<i>W/0/10</i>	<i>[Signature]</i>
----	-----------------------	---	---------------	--------------------

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, *keagustus*, 201*9*
Mahasiswa

[Signature]
Moh. Saleh, S.H., M.H.

[Signature]
Rini Sutendari



BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Pada Hari ini Selasa Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis:

Nama Mahasiswa : Rini Wulandari
No. Induk Mahasiswa : 12118015
Program Studi/Angkatan : Magister Hukum / 36
Judul Penelitian : URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing: Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum
Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah 15 Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Surabaya, 04 Agustus 2020

Dosen Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum
Mahasiswa : Rini Wulandari
Peserta Seminar :

1. INEKE VANESSA P.	6. DWI IRAWATI	11. ARDI ANUGRAH
2. AGUS ANDRIANTO	7. ISTI WIDYASARI	12. LAURENCIA C.
3. RINI WULANDARI	8. SYARIF BUDI	13. HENDRAWAN S.
4. FANDI SEPTI	9. HELEND KASANDA	14. SISWARI
5. INES CAESARINA	10. IKHWAN JAYA	15. SUNARI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Pada Hari ini Selasa Tanggal 11 Bulan AGUSTUS Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis:

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI
No. Induk Mahasiswa : 12118015
Program Studi/Angkatan : Magister Hukum / 36
Judul Penelitian : URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing: Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah 15 Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Dosen Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum
Mahasiswa : Rini Wulandari

Penyanggah,



(Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn)

Pembimbing,



(Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum)




SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :RINI WULANDARI
2. NIM :12118015
3. Judul Skripsi /Tesis :URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 27 Agustus 2020

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.04
Tgl Terbit : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI

No. Induk : 12118015

Alamat : Kota Surabaya

Telp/HP : 0821-4625-6508

Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Judul Tesis : URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tgl Dimulai :

Surabaya, 8 Agustus 2020

Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

RINI WULANDARI

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMBIMBING
1	Perbaikan dan Pendalaman Post Seminar Proposal	1 Feb 2020	<i>[Signature]</i>
2	Konsultasi kerangka berpikir dasar untuk pembahasan	2 Feb 2020	<i>[Signature]</i>
3	Konsultasi pembahasan bab 2	13 Feb 2020	<i>[Signature]</i>
4	Konsultasi pembahasan revisi bab 2	6 Maret 2020	<i>[Signature]</i>
5	Konsultasi pembahasan bab 3	20 Maret 2020	<i>[Signature]</i>
6	Konsultasi pembahasan revisi bab 3	03 April 2020	<i>[Signature]</i>
7	Konsultasi pembahasan revisi bab 4	08 Mei 2020	<i>[Signature]</i>
8	Konsultasi pembahasan revisi bab 4	16 Juni 2020	<i>[Signature]</i>
9	Proofread hasil akhir sebelum cek plagiasi	19 Juni 2020	<i>[Signature]</i>
10	Proofread akhir revisi setelah cek plagiasi	06 Juli 2020	<i>[Signature]</i>

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : RINI WULANDARI

No. Induk Mahasiswa : 12118015

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 6 Agustus 20.20
Mahasiswa

Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum

Rini Wilandari

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
3. Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap

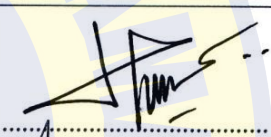
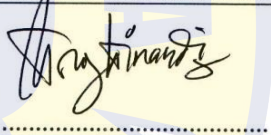


FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

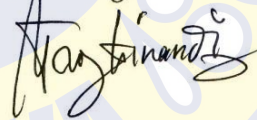
NAMA : RINI WULANDARI
N I M : 12118015
Tanggal Penilaian :
Judul Tesis : **URGENSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**
Pembimbing : Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
PENYANGGAH	Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn.	
PEMBIMBING	Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum	

Surabaya, ..26 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI WULANDARI
NIM : 12118015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya

Menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Surabaya,
Yang membuat pernyataan,



Rini Wulandari
NIM 12118015

RINGKASAN

Pengesahan UU KPK tahun 2019 menimbulkan kegaduhan publik dengan beragam reaksi di masyarakat yang didukung sejumlah akademisi hingga melakukan petisi sebagai penolakan terhadap perubahan UU KPK tersebut.¹ Beberapa perubahan di dalam UU KPK yang disetujui Presiden, diantaranya adalah pengaturan pengangkatan Dewan Pengawas, kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) oleh Presiden diusulkan dan dua tahun setelah proses penyidikan. Namun kebijakan ini telah berdampak pada kekecewaan hingga mundurnya beberapa kepemimpinan KPK.² Di sisi lain muncul penolakan dari kelompok pelaksana KPK dan beberapa pemerhati KPK, namun dukungan terhadap perubahan UU KPK diperlukan sebagai usaha negara untuk menguatkan kinerja KPK karena keberadaannya telah dilegitimasi masyarakat mampu memberikan harapan bagi pemberantasan korupsi namun masyarakat kurang mengetahui evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja KPK itu sendiri.

Perubahan tersebut telah menimbulkan permasalahan di ranah publik dalam bentuk dukungan dan penolakan di masyarakat luas. Diantara yang menolak banyak masyarakat yang menilai bahwa dengan perubahan UU KPK dalam memberantas TPK karena ada kekhawatiran akan melemahkan kinerja KPK sehingga menurunkan kemampuan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi sebagai akibat hukum atas pengaturan baru KPK pada pasal 21 ayat 1 UU KPK Tahun 2019 terkait struktur KPK. Pasal tersebut telah merubah pasal 21 ayat 1 UU KPK Tahun 2002 dengan menghapuskan jabatan Penasihat KPK dan membentuk struktur baru yaitu Dewan Pengawas. Pada undang-undang tersebut sebelumnya Penasihat KPK berada di bawah Pimpinan KPK dan dalam perubahan UU KPK Tahun 2019 struktur tersebut menjadi Dewan Pengawas yang berada di atas Pimpinan KPK. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian hukum judul yang akan disintesis melalui judul penelitian yaitu “Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi.”

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai melalui tesis ini. Pertama, untuk memberikan telaah dan analisis hukum terhadap Pengawasan Penegakkan Hukum TPK Berdasarkan Undang-Undang No.30. Tahun 2002 sehingga diperlukan Dewan Pengawas untuk meningkatkan kinerja KPK melalui UU No. 19. Tahun 2019. Kedua, untuk memberikan telaah dan analisis terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan TPK berdasarkan UU No. 19. Tahun 2019. Pengawasan Penegakkan Hukum TPK menurut Undang-Undang No.30. Tahun 2002 diulas berdasarkan teori tindak pidana, penegakan hukum pidana dan teori pengawasan. Pokok dari teori tindak

¹ Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, *Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Naskah Publikasi. Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. 2019, hal.25

² Lihat Artikel Hukum, Aji Presetyo, *Dampak Instan Perubahan UU KPK*, Diakses Pada Website: *Hukum Online*, Tanggal 15 Oktober 2019

pidana menurut pendapat hukum Van Hamel³ bahwa “perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.” Pengertian tersebut menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 2) melawan hukum; 3) dilakukan dengan kesalahan; dan 4) patut dipidana. Selanjutnya oleh Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴ Sedangkan menurut Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas dengan membagi beberapa unsur. Pertama adalah “perbuatan pidana” (*criminalact*), kedua adalah “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Kedua istilah tersebut dikenal sebagai “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*) karena mencakup mengenai isi hukum pidana sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dikenal dengan hukum acara pidana (*criminal procedure*).⁵ Dengan demikian pengawasan terhadap lembaga KPK adalah pengawasan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidananya kesalahan seseorang sebagai akibat pelanggaran komponen KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Apabila pelanggaran tersebut memenuhi kriteria perbuatan pidana dan cara yang dilakukan senyatanya telah melawan hukum seperti yang telah diatur dalam UU KPK maka dapat dijatuhkan pidana atas kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam konteks pengawasan lembaga KPK penegakan hukum terhadap seluruh komponen KPK harus berpedoman pada tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat yang mendudukkan dimensi penegakan hukum pidana yang semestinya. Implementasinya harus dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum serta konsekuensi pertanggungjawaban hukum berdasarkan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab berdasarkan kesetiaan hukum dan tidak diskriminasi. Artinya penegakan hukum korupsi tidak hanya tajam diterapkan kepada masyarakat namun tumpul kepada komponen Lembaga KPK itu sendiri.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm. 41

⁴ Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, 1990, Hlm. 9

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 1. dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Cetakan I, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm.4

ABSTRAK

Tesis ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memberikan telaah dan analisis hukum terhadap Pengawasan Penegakkan Hukum TPK Berdasarkan Undang-Undang No.30. Tahun 2002 sehingga diperlukan Dewan Pengawas untuk meningkatkan kinerja KPK melalui UU No. 19. Tahun 2019. Kedua, untuk memberikan telaah dan analisis terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan TPK berdasarkan UU No. 19. Tahun 2019. Kedua permasalahan tersebut secara teoritis berdasarkan teori rindak pidana, penegakkan hukum pidana dan konsep pengawasan yang diaplikasikan terhadap kedua undang-undang KPK tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menguraikan kedua permasalahan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian memberikan argumentasi hukum bahwa pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPK seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Bab II, UU KPK Tahun 2002. Pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban seperti yang telah disebutkan dalam Bab III Pasal 20 dan organ pelaksanaannya telah ditentukan dalam Susunan Organisasi KPK yang tertuang dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 UU KPK Tahun 2002. Implmentasai pengawasan internal KPK secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Internal berdasarkan ketentuan kode etik yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Berdasarkan UU KPK Tahun 2019, Pengawasan KPK berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Huruf (a) telah menetapkan struktur baru yaitu Dewan Pengawas dengan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B. Kesimpulan penelitian yang pertama adalah berdasarkan UU KPK Tahun 2002 tidak ada urgensi kebutuhan Dewan Pengawas karena seluruh intrumen pengawasan sudah ada hanya implmentasinya yang belum efektif. Berdasarkan UU KPK Tahun 2019 kebutuhan Dewan Pengawas adalah sebuah kebutuhan hukum yang urgen dalam rangka pembagunan hukum terkait pengawasan KPK yang berpeasitan hukum dan tidak diskriminasi. Kesimpulan kedua bahwa diantara kewenangan Dewan Pengawas KPK terdapat satu kewenangan yang berpotensi milikia akibat hukum yaitu kewenangan pemberian perizinan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan. Kompromi politis merupakan argumentasi yang dapat diajukan sehingga dapat mengundur waktu dan menghambat Dewas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Alasan ini memberikan gambaran hukum sebagai kendala dalam percepatan pemberantasan kosupsi.

Kata kunci: Pengawasan, Dewan Pengawas, KPK

ABSTRACT

This thesis has two objectives. First, to provide a legal review and analysis of the TPK Law Enforcement Supervision based on Law No.30. 2002 so that the Supervisory Board is needed to improve the performance of the KPK through Law no. 19. Year 2019. Second, to provide a study and analysis related to the legal consequences arising from the authority of the KPK Supervisory Board in eradicating TPK based on Law no. 19. In 2019. The two problems are theoretically based on criminal action theory, criminal law enforcement and the concept of supervision that are applied to the two KPK laws. The legal research method used to describe these two problems is juridical normative with two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of the study provide legal arguments that supervision is carried out on the implementation of the duties, authorities and obligations of the KPK as mentioned in Article 6 to Article 15 Chapter II, the Corruption Eradication Commission Law of 2002. Implementation of responsibilities and accountabilities as mentioned in Chapter III Article 20 and The implementing organs have been determined in the Corruption Eradication Commission's Organizational Structure as stipulated in Article 21 to Article 28 of the Corruption Eradication Commission Law of 2002. Implementation of KPK internal supervision is specifically carried out by the Directorate of Internal Supervision based on the provisions of the code of ethics stipulated in KPK Regulation Number 7 of 2013 concerning Values. Personal Basis, Code of Ethics and Code of Conduct of KPK. Based on the 2019 KPK Law, KPK Supervision based on the provisions of Article 21 Paragraph 1 Letter (a) has established a new structure, namely the Supervisory Board with the duties of the Supervisory Board regulated in Article 37B. The first research conclusion is that based on the Corruption Eradication Commission Law of 2002 there is no urgent need for the Supervisory Board because all monitoring instruments already exist, only their implementation is not yet effective. Based on the 2019 KPK Law, the need for the Supervisory Board is an urgent legal need in the framework of legal development related to the supervision of the KPK which has legal issues and is not discriminatory. The second conclusion is that among the powers of the KPK Supervisory Board there is one authority that has the potential to be due to law, namely the authority to grant permits for confiscation, searches and wiretaps. Political compromise is an argument that can be put forward that can delay time and prevent Dewas from giving permission or not giving permission for wiretapping, searches and / or confiscation. This reason provides a picture of the law as an obstacle in accelerating the eradication of corruption.

Keywords: Supervision, Supervisory Board, KPK

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kekehadirat TUHAN YME. karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, Tesis yang berjudul “**Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi**” ini dapat terselesaikan dengan baik sekaligus sebagai salah satu syarat akhir studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian Tesis ini tidak akan terwujud. Melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak dan Ibu saya tercinta atas seluruh cinta kasih, doa tiada henti dan terima kasih juga atas dukungan baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini..

Dalam penyelesaian Tesis ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak DR. IR. H. SRI WIWOHO MUDJANARKO, ST, MT, IPM, selaku (Plt) Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak DR. RUSDIANTO SESUNG, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
3. Bapak DR.MOH. SALEH, S.H.,M.H.,selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

4. Ibu WORO WINANDI, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini
5. Segenap Dosen dalam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Narotama Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Pimpinan dan Staff Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, atas pelayanan yang diberikan hingga penulis menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya.
7. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat, seperjuangan yang tidak bisa disebut satu-persatu sebagai motivator di dalam menyelesaikan Tesis ini.

Serta terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dukungan doa dan semangat yang kalian sangat berarti untuk saya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan Universitas dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Penyusun,

Rini Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	xxiii
Ringkasan.....	xxiv
Abstrak	xxvi
Abstract	xvii
Kata Pengantar	xviii
Daftar Isi.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Teori Tindak Pidana	10
1.5.2 Teori Penegakkan Hukum Pidana.....	13
1.5.3 Teori Pengawasan	18
1.6 Originalitas Penulisan	22
1.7 Metode Peneltian	25
1.7.1 Tipologi/ Jenis Penelitian	26
1.7.3 Bahan Hukum	27
1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	29
1.8 Sistematika Penulisan	31
BAB II PENGAWASAN TERHADAP KPK SEBELUM BERLAKUNYA	
UNDANG-UNDANG KPK TAHUN 2019.....	33
2.1 Gambaran Umum Pengawasan Dalam Penegakan Hukum	33
2.1.1 Pengawasan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia	34

2.1.2 Pengawasan di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia	36
2.2 Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019	37
2.2.1 Dasar Hukum Pengawasan	37
2.2.2 Implementasi Pengawasan Berdasarkan UU KPK Tahun 2002	38
2.2.3 Evaluasi Efektivitas Pengawasan Terhadap KPK sebelum Berlakunya UU KPK Tahun 2019	48
2.3 Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019	58
2.3.1 Kedudukan Dewan Pengawas Secara Konstitusional	58
2.3.1 Substansi Permasalahan Kedudukan Dewan Pengawas KPK ...	62
2.3.2 Pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK oleh Dewan Pengawas	65
BAB III DAMPAK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI	70
3.1 Permasalahan Kewenangan Dewan Pengawas KPK	70
3.1.1 Analisis Permasalahan Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Perizinan Penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan	70
3.1.2 Analisis Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Menyusun Dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	74
3.2.3 Analisis Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas Dalam melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	79
3.2 Akibat Hukum Kewenangan Dewan Pengawas KPK	87
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93